

KORAN DIGITAL

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI RABU
23 AGT 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



WAGUB HADI MULYADI PIMPIN DELEGASI KALTIM DI 88th IFLA WORLD CONGRESS DI BELANDA

**MUDA
DINAMIS
AMANAH**



**ARIE
WIBOWO**

CALEG DPRD KOTA SAMARINDA
DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG





Lokasi jalan Sehat Media Kaltim eks Bandara Temindung

AYO, RAMAIKAN JALAN SEHAT HUT KE-3 MEDIA KALTIM, BERHADIAH SEPEDA MOTOR LISTRIK

SAMARINDA - Masih dalam rangka perayaan hari jadinya yang ke-3, Media Kaltim bakal menggelar Jalan Sehat yang akan dilaksanakan pada 27 Agustus 2023 mendatang. Ketua Panitia, Adhi Abdhian mengungkapkan, hingga saat ini sudah ratusan peserta yang sudah mendaftar dan siap meramaikan kegiatan spektakuler gelaran Media Kaltim tersebut.

"Ini adalah acara puncak HUT ke-3 Media Kaltim," ujar Ketua Panitia Adhi Abdhian pada Selasa (22/8/2023).

Menariknya, Adhi-sapaan akrabnya, membeberkan bahwa kegiatan ini menyediakan hadiah utama berupa sepeda motor listrik.

"Selain hadiah utama sepeda motor listrik, masih banyak lagi hadiah lainnya yang disiapkan untuk peserta. Di antaranya, TV LED, Rice Cooker, dan barang elektronik lainnya," ujar Adhi.

Banyaknya hadiah tersebut tentunya juga didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, Ketua KONI Kaltim, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, dan juga beberapa perusahaan swasta lainnya.

Bagi yang belum mendaftar, pendaftaran

peserta jalan sehat masih dibuka.

Cara mendaftarnya pun sangat mudah yakni dengan mengunjungi situs Berita Media Kaltim, maka akan muncul gambar iklan jalan sehat HUT ke-3 Media Kaltim, calon peserta cukup klik gambar tersebut langsung akan diarahkan pada form pendaftaran peserta.

"Peserta bisa mendaftarkan diri, dengan mengisi form dengan mencantumkan biodata asli dan nomor HP," kata Adhi.

Diketahui, titik Start kegiatan Jalan Sehat ini akan dimulai eks Bandara Temindung, melewati Jalan Gatot Subroto, Hasan Basri, Belibis, kembali ke Gatot Subroto dan finish juga di eks Bandara Temindung.

"Jalan sehat akan dimulai pukul 06:00 Wita sampai selesai," tambahnya.

Selanjutnya, usai mengikuti jalan sehat para peserta juga akan diajak senam sehat bersama. "Acara jalan sehat ini adalah olahraga murah dan sangat menyehatkan. Untuk itu kami mengundang semua elemen masyarakat Kaltim dan Samarinda khususnya untuk memeriahkan acara puncak HUT Media Kaltim yang ke-3 ini," pungkas Adhi. **(han)**

MKP MEDIA KALTIM PROMOSINDO



RAMAIKAN
& IKUTI
EVENT
NYA
YUK

ACARA PUNCAK
HUT KE-3 MEDIA KALTIM :

27 AGUSTUS 2023

DAFTAR PAKAI
KUPON
DIGITAL
GRATIS

IKUTI JUGA
SENAM SEHAT
BERSAMA
(XEROBIC QUEEN76)

JALAN SEHAT



LAPANGAN EX. TEMINDUNG SAMARINDA
MULAI PUKUL 06.00 WITA

Daftarkan diri gratis melalui link:

<https://registration.myevents.id/contests/1/registration>



Paket **MAKSIMAL** Karyawan

(Makan Siang Hemat Lengkap Untuk Karyawan)

Paket Ber2

Rp **90rb** nett
/pax

Paket Ber3

Rp **130rb** nett
/pax



Pilihan 7 Menu Khas Nusantara

- 1 Ikan Dori Saus Telur Asin
- 2 Ikan Dori Asam Manis
- 3 Ayam Geprek Cabe Hijau
- 4 Ayam Bakar Taliwang
- 5 Rendang Daging Padang
- 6 Ikan Nila Masak Tauco
- 7 Ikan Nila Goreng Colo-Colo

FREE

1 pax comp.
Light Meal





WAGUB HADI MUYADI PIMPIN DELEGASI KALTIM DI 88th IFLA WORLD CONGRESS DI BELANDA

SAMARINDA - Untuk pertama kalinya, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengikuti 88th IFLA World Library and Information Congress 2023 yang diselenggarakan di Rotterdam, Belanda. Kongres ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kaltim dalam upaya meningkatkan perhatian terhadap masalah perpustakaan.

Delegasi Kaltim yang berjumlah 16 orang dipimpin oleh Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, dan melibatkan anggota Komisi IV DPRD Kaltim yang dipimpin oleh Akhmad Reza Fahlevi. Mereka bergabung dengan delegasi Indonesia lainnya di Gedung Alloy Rotterdam.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim, M Syafranuddin, yang akrab disapa Ivan, mengungkapkan bahwa seluruh delegasi Kaltim telah bergabung dengan delegasi Indonesia yang dipimpin

oleh Kepala Perpustakaan Nasional, Syarif Bando. Acara yang dimulai pukul 10.00 waktu setempat dihadiri oleh lebih dari 2.500 peserta dari seluruh dunia.

Presiden IFLA, Barbara Lison, membuka acara kongres yang berlangsung di pusat kota Rotterdam. Syafranuddin menekankan pentingnya keikutsertaan Kaltim dalam kongres ini sebagai langkah awal dalam pengembangan perpustakaan di provinsi tersebut.

Selama berada di Belanda, delegasi Kaltim akan fokus mendalami pengelolaan perpustakaan dari berbagai negara. "Kami akan mendalami pengelolaan perpustakaan di beberapa negara. Diskusi antar negara akan mencakup pembahasan pengalaman berbagai negara dalam mengelola perpustakaan," kata Syafranuddin. **(MK)**



SEHARI DUA KEBAKARAN TERJADI DI PPU,
**LAHAN & TUMPUKAN
SABUT KELAPA TERBAKAR**



HETIFAH MINTA MUATAN LOKAL
BAHASA DAERAH
DI SEKOLAH DIPERKUAT PERDA



Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudin diwawancarai usai kegiatan. (Deddy/RadarMedia)

HETIFAH MINTA MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH DI SEKOLAH DIPERKUAT PERDA

PPU - Keberagaman bahasa daerah merupakan salah satu kekayaan dan kekuatan Republik Indonesia. Oleh karena itu, keberadaannya mesti dipertahankan dan dilestarikan oleh semua elemen, terkhusus pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hetifah Sjaifudin dalam acara Diskusi Pendidikan pada Selasa (22/8/2023), bertepatan "Implementasi Nilai-nilai karakter kebangsaan sebagai bentuk merdeka belajar".

Hetifah dalam kesempatan ini mengatakan kegiatan ini digelar untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan kebangsaannya. Utamanya bagi para siswa maupun guru di dalam kurikulum merdeka.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Dinas Pendidikan, Pemu-

da dan Olahraga PPU (Disdikpora), guru penggerak serta Kepala sekolah SMA-SMK se-Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser.

"Jiwa nasionalisme ini bukan hanya saat jadi mahasiswa, baru bicara soal negara dan kebangsaan. Maka dari itu kita mulai memupuk hal ini bukan hanya dari sekolah, melainkan di rumah juga," ujar dia.

Selain itu, lanjut Hetifah, mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni juga perlu. Terlebih dalam menghadapi hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) dari segi pendidikannya.

Dikatakan, banyaknya bahasa daerah yang juga mulai punah. Serta tenaga pengajar bahasa kedaerahan pun saat ini sangat minim bahkan hampir tidak ada.

"Kita sangat perlu memperkuat pendidikan bahasa

daerah bagi PPU dan Paser yang sudah mulai punah. Yakni dengan memperkuat program sekolah berupa muatan lokal bahasa daerah. Dengan menyekolahkan para pendidik agar mumpuni dalam mengajarkan bahasa daerah tersebut," jelas Hetifah.

Dia juga berharap hal ini menjadi keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) baik PPU maupun Paser. Keterlibatan ini dituangkan melalui peraturan daerah (perda) dalam program pengajaran bahasa daerah.

"Kita akan mendorong pula akan menjadi peraturan di pusat nantinya. Kita inginkan Pemda bisa menuangkan hal ini berupa Perda. Kalau ini sudah bagus dari bawah maka kita akan dorong di pusat juga. Jadi daerah tidak lagi menunggu-nunggu peraturan pusat," tutup Hetifah. (nrd)



Para personel saat melakukan pemadaman di dua titik kebakaran di Kecamatan Penajam.
(Pusdalops BPBD PPU for MediaKaltimGroup)

SEHARI DUA KEBAKARAN TERJADI DI PPU, LAHAN DAN TUMPUKAN SABUT KELAPA TERBAKAR

PPU - Dalam cuaca panas hari ini, Selasa (22/8/2023), dua titik api muncul dan menyebabkan kebakaran lahan di Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU). Yakni di Kelurahan Pejala dan Kelurahan Gunung Seteleng.

Laporan yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU, terjadi di RT 5 Kelurahan Pejala, sekira pukul 13.30 Wita. Tepatnya terjadi pada tumpukan sabut kelapa di sebuah pabrik yang dikelola oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Dana Amanah Masyarakat.

Laporan yang masuk itu langsung ditindaklanjuti oleh tim gabungan yang terkoordinasi dalam Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD PPU. Personel yang terdiri dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Pemadaman (DKPP), Dinas Pertanian (Distan), TNI/Polri serta Satpol-PP PPU langsung menuju lokasi kejadian.

"Setelah tiba di lokasi tim gabungan dibantu masyarakat

sekitar langsung melakukan pemadaman dan pendinginan bersama di lokasi," ujar Kepala Pelaksana BPBD PPU, Budi Santoso melalui rilis resminya.

Setidaknya 4 armada Damkar Pos Penajam dan Pos Petung serta 1 mobil tandon warga diterjunkan. Kebakaran baru padam sepenuhnya sekira pukul 15.30 Wita, dan menyebabkan bertumpuk-tumpuk sabut kelapa pra-produkse ludes.

Kejadian kedua terjadi di RT 7 Kelurahan Gunung Seteleng sekira pukul 15.00 Wita. Mengakibatkan lahan, semak belukar dan gambut habis terbakar.

Tim gabungan juga langsung dikerahkan sesaat laporan masuk. Untuk menghentikan kebakaran meluas, setidaknya 6 armada pemadaman diturunkan.

"Pemadaman dilakukan baik dengan cara manual dan menggunakan mesin portable serta menggunakan mobil pemadam," katanya.

Yaitu dengan menerjuankan 4

unit mobil pemadam DPKP PPU, 1 unit mobil tangki Distan PPU, 1 unit mobil tangki Dinas Perkim. Juga 1 unit mesin portable BPBD dan 2 unit mesin portable Distan PPU.

Sekira pukul 19.00 Wita, kebakaran hingga pendinginan lokasi baru berhasil ditakhlukkan. Dari laporan, secara visual saat ini di lokasi kebakaran telah padam dan tidak terdapat potensi timbulnya titik api.

Lebih lanjut, Budi terus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dalam menyikapi cuaca ekstrem kali ini. Khususnya dalam menyikapi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi salah satu potensi paling rawan terjadi di PPU. "Potensi karhutla pada musim kemarau cukup tinggi. Maka dari itu, dukungan masyarakat untuk segera melaporkan dan untuk tidak beraktivitas yang dapat menimbulkan titik api, sangat dibutuhkan," pungkasnya. **(sbk)**



Bupati PPU Hamdam dalam rapat pembahasan perjanjian pengalihan PI 10 persen WK Sangasanga dan WK East Kalimantan dan Attaka (EA) di Yogyakarta Selasa (22/8/2023). (Humas Setkab PPU for Media Kaltim Group)

SELANGKAH LAGI, PPU DAPAT PARTICIPATING INTEREST 10 % BLOK EASTKAL - ATTKA

PPU - Ketidakjelasan jatah participating interest (PI) 10 persen atas hasil pengelolaan Wilayah Kerja Eastkal untuk Penajam Paser Utara (PPU) akhirnya ada titik terang. Bupati PPU, Hamdam Pongrewa bahkan menyebutnya "tinggal selangkah lagi" hak yang memang untuk daerah penghasil minyak dan gas (migas).

Perihal ini terungkap saat rapat pembahasan perjanjian pengalihan PI 10 persen Wilayah Kerja (WK) Sangasanga dan WK East Kalimantan dan Attaka (EA) yang digelar antara PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim dengan PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) di Yogyakarta pada 21-22 Agustus 2023.

Pertemuan ini dihadiri oleh para pemegang saham PT MMP - EA, termasuk Perumda Benuo Taka Energy (BTE) PPU yang diwakili langsung oleh Bupati PPU Hamdam selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM). Selain itu ada Pemkab Kutai Kartanegara (PT Mahakam Gerbang Raja Migas), Pemkot Bontang (PD Aneka Usaha dan Jasa Bontang), Pemkot Balikpapan melalui Perumda Manuntung Sukses Balikpapan dan Perumda Varia Niaga Samarinda.

Usai kegiatan, Hamdam men-

gaku bersyukur dengan adanya progres baik PI 10 persen itu. Diketahui berdasarkan hasil pembahasan bersama itu pula, diperkirakan pada September mendatang telah memasuki tahap penandatanganan kesepakatan dengan PT PHKT.

"Alhamdulillah setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, PI 10 persen akhirnya kontrak dijadwalkan untuk ditandatangani, bulan depan. Yang jelas, bisa dikatakan satu langkah lagi, InsyaAllah sudah bisa dapat hak kita," katanya.

Pertemuan ini digelar sekaligus merujuk pada Peraturan Menteri ESDM 37/2016 tentang tata cara penawaran PI 10 persen pada wilayah kerja migas. Adapun PI 10 persen adalah besaran maksimal 10 persen pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang wajib ditawarkan oleh kontraktor ke pada BUMD setempat.

Serta Keputusan Menteri ESDM tentang pelaksanaan ketentuan penawaran PI 10 persen ke pada BUMD di wilayah kerja migas termasuk di PPU. Sementara itu, Blok Eastkal adalah sumur migas yang ditinggalkan PT Chevron Indonesia Company.

Perusahaan berbendera

Amerika Serikat itu tak melanjutkan pengelolaan migas lepas pantai (offshore), setelah masa kontrak kerja sama dengan Indonesia berakhir 24 Oktober 2018. Pemkab PPU melalui Perumda BTE memiliki saham 18,46 persen pada pengelolaan yang dilakukan PT MPP - EA.

Hamdam menyebutkan perjuangan untuk mendapatkan hak itu cukup panjang dan penuh liku-liku. Bahkan secara resmi sudah dilakukan sejak 2017 lalu.

Salah satu upaya Pemkab PPU, adalah melalui konsorsium bersama empat kabupaten/kota di Kaltim. Masing-masing PPU, Balikpapan, Kutai Kartanegara dan Kota Bontang yang leadingnya berada di PT MMP Kaltim.

Tujuan utamanya adalah bagaimana daerah bisa segera memperoleh haknya berupa PI 10 persen dari pengelolaan migas yang ada di wilayah PPU tersebut.

"Saya bersyukur sekali PI 10 persen ini segera terwujud. Mudah-mudahan bisa menjadi kenang-kenangan diakhir jabatan saya. Kalaupun belum sempat keluar hingga akhir jabatan, yang jelas progresnya tinggal selangkah lagi pasti akan terlaksana," tutup Hamdam. **(sbk)**



DPRD KUKAR SOROTI AKTIVITAS PANDU-TUNDA DI PERAIRAN MUARA MUNTAI

**BEM HUKUM GELAR SEMINAR
STRATEGI PENCEGAHAN PELECEHAN
SEKSUAL DI UNIKARTA**





Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Kukar, Aji Muhammad Ari Junaidi. (Istimewa)

PEMKAB KUKAR SIAPKAN SENAM JEPEN SEBAGAI OLAHRAGA WAJIB SD-SMP

TENGGARONG - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia (RI), mengeluarkan aturan baru. Berupa mewajibkan seluruh sekolah untuk menjadikan senam sebagai olahraga wajib di sekolah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk pembentukan fisik dan karakter generasi masa depan.

Penerapan program ini di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sendiri, dipadukan dengan budaya lokal. Yakni dengan menetapkan Senam Jepen sebagai senam wajib di setiap sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Sekarang masih kita godok regulasinya. Jika disetujui nanti akan segera dilaksanakan dimasa perubahan sekitar bulan September. Karena kita juga berencana menjadikan senam ini sebuah gerakan di masyarakat," jelas Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga, Dispora Kukar, Aji Muhammad Ari Junaidi, saat ditemui di ruang

kerjanya, Selasa (22/8/2023).

Ia mengatakan, kewajiban Senam Jepen ini adalah upaya pemerintah dan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melestarikan budaya Kukar. Khususnya di era modern ini.

"Kami terus persiapkan juga melakukan sosialisasinya ke sekolah-sekolah untuk memasyarakatkan Tarian Jepen ini," tambahnya.

Senam Jepen sendiri merupakan perpaduan gerakan senam atletik bersama dengan Tarian Jepen, sebuah tarian tradisional asal Kutai. Kedua gerakan ini dipadukan dengan lagu Tarian Jepen. Ari mengatakan nantinya peserta senam akan mendapatkan instruktur yang telah mempelajari gerakan ini. Gerakannya sendiri akan ditampilkan melalui video taping yang disediakan oleh Dispora Kukar.

"Ini pertama kalinya, dan kami masih mempersiapkan gerakan dan video instruksinya," pungkasnya. **(tab)**



Suasana sesi foto bersama pada seminar yang digelar di ruang perkuliahan Fakultas Hukum Unikarta. (Ady/ Radar Kukar)

BEM HUKUM GELAR SEMINAR STRATEGI PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL DI UNIKARTA

TENGGARONG - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara (Fahum Unikarta), berkerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisarariat Hukum Unikarta. Menggelar seminar hukum yang bertajuk Strategi Pencegahan Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi Unikarta. Pada Selasa (22/8/2023).

Kegiatan yang diselenggarakan di ruang perkuliahan Fakultas Hukum Unikarta ini, turut menghadirkan Rektor Unikarta, Ince Raden. Bersama dengan Ketua Satgas pencegahan pelecehan seksual di Unikarta, Juliati Br Ginting, sebagai narasumber.

Kegiatan ini pun menuai apresiasi dari Rektor Unikarta, ia mengatakan seminar semacam ini memang perlu lebih sering diselenggarakan. Untuk memberikan edukasi dan pemaha-

man pada seluruh civitas akademika di Unikarta.

“Supaya nanti para mahasiswa, dosen, kariawan dan pejabat struktural serta semua civitas akademik kampus. Harus paham persis seperti apa yg termasuk dalam kategori pelecehan,” kata Ince.

Ia mengatakan, bahwa dalam diskusi tersebut, pihaknya juga banyak memberikan masukan dan informasi pada semua peserta seminar. Bahwa seluruh pihak harus menyadari sedini mungkin, artinya mahasiswa juga perlu peduli dan melindungi rasa amannya.

“Kita juga akan membuka sistem pelaporan secara online jika hal seperti ini terjadi. Karena hal-hal seperti ini tidak memandang usia tidak memandang etnis dan agama bisa saja terjadi pada siapapun,” tambahnya.

Dalam upaya mengantisipasi kasus pelecehan seksual di Kampus Unikarta, pihaknya juga telah

membentuk Satgas Pencegahan Pelecehan Seksual di Unikarta. Sejak 30 Maret 2023.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Komisarariat Hukum Unikarta, Rofi Imam Furo mengatakan, mengatakan pihaknya sengaja membangun kerjasama dengan BEM Fakultas Hukum Unikarta dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Mengingat kasus pelecehan seksual di ruang lingkup kampus, sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang kerap terjadi diberbagai kampus.

“Karena sepertinya memang belakangan isu pelecehan seksual ini menjadi topik pembahasan yang ramai dibicarakan. Oleh sebab itu kami merasa perlu tahu dan perlu untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa lain. Bagaimana sih pencegahan hal ini di kampus kita, dan seperti apa pihak kampus menyikapinya,” pungkasnya. **(tab)**



Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid. (Ady/Radar Kukar)

KEMARAU PANJANG, KETUA DPRD KUKAR INGATKAN MASYARAKAT TIDAK BAKAR LAHAN DULU

TENGGARONG - Kemarau berkepanjangan sebagai buntut dari fenomena El Nino, mengakibatkan sejumlah besar wilayah di Indonesia mengalami kekeringan. Hal ini tidak hanya mengancam ketersediaan air bersih bagi masyarakat, tapi juga turut meningkatkan potensi terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Di Kutai Kartanegara (Kukar) sendiri, kasus karhutla meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Cuaca panas tanpa hujan yang melanda Kukar dalam tiga bulan ke belakang, mengakibatkan hutan gambut di Kukar rawan terbakar. Seperti yang terjadi di Desa Sabintulung (Kecamatan Muara Kaman), Desa Bendang Raya (Kecamatan Tenggarong), Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan dan Kota Bangun.

Kondisi ini pun mendapat sorotan dari Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan

pembakaran lahan atau kebun terlebih dahulu. Karena dikhawatirkan dapat memicu karhutla.

"Cuaca kita ini lumayan panas, hampir tiga bulan tidak ada hujan. Kalau kita lihat kondisi air Sungai Mahakam juga surut. Kondisinya ini rawan sekali, makanya saya imbau masyarakat kita jangan bakar-bakar lahan ataupun kebun," imbaunya.

Bahkan menurut pengamatannya, kondisi udara di Kukar juga sudah mengalami perubahan. Ia merasa udara di Kukar mulai berkebadan dikarenakan asap dari karhutla. Sehingga langkah antisipasi perlu dilakukan oleh semua pihak, agar karhutla di Kukar tidak semakin meluas dan berdampak lebih buruk.

"Unit pemadam kita ada, tapi dikhawatirkan kalau unitnya tidak bisa menjangkau terlalu jauh karena terbatas, seperti kebakaran lahan gambut tidak bisa truk masuk," pungkasnya. (adv)



Suasana rapat pansus terkait pajak dan retribusi daerah di DPRD Kukar. (Istimewa)

DPRD KUKAR RESMI BENTUK PANSUS PAJAK DAN RETRIBUSI, UPAYA PENINGKATAN PAD KUKAR

TENGGARONG - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) sedang fokus membentuk Panitia Khusus (Pansus), terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kukar. Secara resmi dikomandoi langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kukar, Sopan Sopian.

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar diundang. Di antaranya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar, Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah (BP-KAD) Kukar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST) Kukar dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar.

Selain itu, turut diundang Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kukar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

(Disperindag) Kukar, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kukar, Dinas Pekerja Umum (PU) Kukar, Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DispORA) Kukar, Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Kukar, Dinas Pertanian dan Peternakan (DKP) Kukar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) dan Dinas Perhubungan (Dishub).

"Selain melakukan pembahasan finalisasi soal pajak daerah dan retribusi, kegiatan ini juga sebagai mempererat silaturahmi dengan OPD-OPD terkait," ungkap Sopan Sopian.

Pada kesempatan itu, Sopan Sopian juga turut mengapre-

siasi atas kehadiran seluruh OPD terkait dalam pembahasan finalisasi soal Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Apalagi dalam hal ini pemerintah kabupaten mendapat kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui penguatan restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi dan harmonisasi dengan UU yang ada, terutama tentang cipta kerja.

"Alhamdulillah rapat Pansus berjalan dengan lancar, begitu pula soal pembahasannya. Hanya sedikit penambahan dan pergeseran pasca per pasal. Dalam waktu dekat ini juga akan kita lakukan sidang paripurna," tutupnya. **(adv)**



Kapal tugboat yang membawa ponton di Perairan Sungai Mahakam. (Rafi'i/Media Kaltim)

DPRD KUKAR SOROTI AKTIVITAS PANDU-TUNDA DI PERAIRAN MUARA MUNTAI

TENGGARONG - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) sejumlah pihak. Membahas terkait pengaturan lalu lintas air, terutama untuk lalu lintas ponton di Kecamatan Muara Muntai. Atau lebih dikenal dengan aktivitas pandu-tunda, tepatnya di Desa Muara Muntai Ilir, belum lama ini.

Rapat dipimpin langsung oleh Sopan Sopian, didampingi Firnadi Ikhsan. Bersama perwakilan Polres Kukar, perwakilan Kodim 0906/Kukar, Camat Muara Muntai, BUMDes Muara Muntai Ilir, hingga perwakilan Pelindo.

"Membahas alur sungai (pandu-tunda) di Muara Muntai, akan diatur oleh pemerintah kabupaten melalui Tunggang Parangan," ungkap Sopan Sopian, Selasa (22/8/2023).

Sejauh ini, memang baru alur lalu lintas di Jembatan Kartanegara di Kecamatan Tenggarong dan Jembatan Martadipura di Kecamatan Kota Bangun, yang sudah dikerjakan oleh Perusahaan Tunggang Parangan.

Dan saat ini, baru masyarakat sekitar yang mengelola secara mandiri secara swakelola. Maka itu perlu ada aturan yang mengatur, agar bisa dikelola sebaik-baiknya dan mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perusahaan daerah Tunggang Parangan.

Diketahui lokasi perairan Muara Muntai yang memiliki patahan sungai dianggap sangat membahayakan aktivitas nelayan setempat. Belum lagi bantaran perairan Muara Muntai yang banyak ditempati oleh masyarakat. Ketika tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan akan berdampak kepada masyarakat itu sendiri.

Sopan memastikan akan kembali menggelar RDP serupa untuk membahas pemantapan terkait aturan aktivitas pandu-tunda di Kecamatan Muara Muntai. Tentunya dengan memanggil pihak terkait yang tidak hadir sebelumnya.

"Artinya bisa sama-sama manfaat bagi masyarakat dan Pemkab, ada rasa aman, nyaman dan tertib," tutupnya. (adv)



SAPRAS MEMPRIHATINKAN, PEMKOT DIDESAK SEGERA RELOKASI SDN 007 GUNTUNG

BACA HALAMAN A2



Delapan OPD Bontang Masuk Final Lomba Keterbukaan Informasi

BACA HALAMAN A3



Sapras Memprihatinkan, Pemkot Didesak Segera Relokasi SDN 007 Guntung

BONTANG - Kondisi sarana dan prasarana (sapras) di SDN 007 Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara bisa dikatakan cukup memprihatinkan. Lantaran banyak sekali permasalahan yang membuat aktivitas belajar mengajar terganggu.

Beberapa permasalahan yang ada di sekolah ini di antaranya sebagian bangunannya masih menggunakan kayu, kondisi WC yang tidak layak, keterbatasan ruang kelas dan bau amoniak pabrik yang kerap mengganggu aktivitas belajar mengajar. Serta sering menjadi daerah langganan banjir.

Selain itu diungkapkan Kepala Sekolah SDN 007 Guntung, Nurmiani ruang kelasnya terbatas, tidak tidak punya pagar dan security, khususnya yang di bagian belakang sekolah.

"Kadang guru lepas pengawasan terhadap anak-anak. Hujan 10 menit langsung banjir. WC sangat tidak memadai kalau hujan airnya meluap dan jadi sarang ular," ujarnya, Selasa (22/8/2023).

Ditambahkan Nurmiani, bahwa sekolah ini terpaksa menerapkan proses belajar mengajar harus secara bergiliran, lantaran kondisi ruang kelas yang terbatas. Sekolah merupakan satu-satunya sekolah yang menampung 18 RT di Kelurahan Guntung, mencapai 589 siswa.

"Kami berharap kepada pemerintah agar bisa dibuatkan sekolah yang lebih layak. Bau amoniak sangat menyengat dan mengganggu proses belajar mengajar. Banyak anak-anak tidak kuat sampai tidak masuk sekolah. Semoga bisa relokasi ke tempat yang lebih ba-



Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris saat meninjau lokasi sekolah bersama Pemkot Bontang.

gus," harapnya.

Sekretaris Daerah Aji Erlynawati menanggapi permasalahan itu dengan segera menindaklanjuti usulan itu, dan kemungkinan akan merelokasi sekolah.

"Memang fasilitasnya kurang representatif, baik WC, ruang UKS-nya, ruang belajar terbatas. Ditambah tengah-tengah sekolah ada rumah warga, juga bau amoniak yang cukup mengganggu. Mungkin memang solusinya akan kita lakukan relokasi," ujarnya saat meninjau sekolah.

Namun begitu, sebelum merelokasi pihaknya tetap akan membuat masterplan rencana pembangunan sekolah terlebih dahulu, yang lengkap dan detail sesuai standar sembari menyiapkan lahan.

"Rencananya tahun 2024 buat mas-

terplan dulu. Tahun 2025 baru bisa proses pembangunan. Lokasi sudah pernah kami tinjau bersama Disdik, di dekat Rusunawa Guntung. Luas lahannya 1,5 hektare," bebernya.

Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris yang hadir dalam tinjauan lapangan tersebut, turut mendesak agar usulan tersebut bisa segera terealisasi. Paling tidak segera dibuat tahap perencanaan terkait relokasi sekolah tersebut

"Harus ditunjang sapras yang baik, agar mencapai pembelajaran yang baik. Maka itu saya mendesak pemerintah harus segera merealisasikan permintaan para guru-guru di sekolah ini, untuk segera mungkin buat masterplan secepatnya. Jadi 2025 bisa segera dibangun," imbuhnya. (adv/al)



Delapan OPD Bontang Masuk Final Lomba Keterbukaan Informasi

BONTANG – Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bontang mengikuti lomba monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi antar OPD dan Kelurahan. Pelaksanaan penilaian pun dilakukan pada 21-22 Agustus 2023 yang akan dikunjungi langsung oleh Komisi Informasi Kaltim.

Dari 20 OPD yang mengikuti lomba keterbukaan informasi, ada sebanyak 8 OPD yang berhasil masuk dalam finalisasi penilaian keterbukaan informasi.

Di antaranya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Inspektorat Daerah, Kecamatan Bontang Selatan, Kelurahan Belimbing, Kelurahan Bontang Baru dan Kelurahan Satimpo.

Kedelapan OPD tersebut telah melalui



YAHYA/ISTIMEWA/MEDIA KALTIM

hasil verifikasi dokumen Self Assessment Questionnaire (SAQ) dan telah disampaikan pada PPID Utama Kota Bontang dan akan dinilai langsung oleh Komisi Informasi Kalimantan Timur pada Senin-Selasa (21-22/8/2023).

Untuk penilaian sendiri, masing-mas-

ing OPD akan mempresentasikan keterbukaan informasi pada saat visitasi Komisi Informasi Kalimantan Timur. (adv/yah)

Pewarta : Yahya
Editor : Nicha Ratnasari



Pelaksanaan penilaian dan visitasi dari komisi informasi Kaltim.



Kondisi Pasar Citra Mas, Loktuan saat ini.

Faisal: Parkiran Pasar Citra Mas Perlu Dibenahi!

BONTANG – Salahsatu sarana prasarana yang masih dirasa kurang di Pasar Citra Mas Loktuan adalah parkiran. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal saat Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 di Pendopo, Rujab Wali Kota, Jumat (18/8/2023).

Dikatakan Faisal, saat ini kondisi parkiran Pasar Citra Mas belum terlalu bagus dan tidak terlihat rapi, sehingga perlu diperhatikan untuk perbaikannya.

Ditambah lagi luas parkiran masih dirasa minim. Menyebabkan banyak kendaraan baik pengunjung maupun pedagang yang terparkir semrawut. Sehingga lalu lintas kendaraan yang akan keluar masuk pasar menjadi terhambat.

"Kondisi ini perlu diperhatikan pak wali, agar

pengunjung yang ingin mencari kebutuhan di Pasar Citra Mas semakin bersemangat berbelanja," ujarnya.

Sementara ini status lahan parkir Pasar Citra Mas, pemerintah masih menggunakan lahan KIE dengan sistem pinjam pakai. Waktunya pun hanya berlangsung selama setahun.

Menjawab masukan tersebut, Wali Kota Bontang mengatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP). Ia akan meminta DKUKMP untuk melengkapi dan membenahi kekurangan yang ada pada parkiran pasar.

Menurutnya, tak hanya parkiran di Pasar Citra Mas yang butuh pembenahan. Masih banyak sisi lainnya yang butuh dibenahi, seperti talang, WC, dan lain sebagainya.

"Semoga di perubahan nanti DKUKMP sudah memasukkan usulan itu. Nanti saya akan koordinasikan," pungkasnya. (adv/al)

Usulan Penangkaran Buaya Sulit Direalisasikan, Wali Kota: Kita Terbentur Aturan

BONTANG – Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal menyarankan agar dibangun sebuah penangkaran buaya di Bontang. Hal ini sebagai solusi mengatasi banyaknya kasus buaya yang muncul ke pemukiman warga beberapa tahun belakangan ini.

Hal itu diungkapkan Faisal saat Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 di Pendo-po, Rujab Wali Kota, Jumat (18/8/2023).

Dikatakannya, kondisi habitat buaya saat ini dan dahulu jauh berbeda. Saat ini dengan semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan di Bontang, maka habitat buaya juga ikut tergeser. Alhasil, semakin banyak buaya yang keluar dari habitatnya untuk mencari mangsa.

Tentunya hal ini menjadi suatu permasalahan, lantaran kehadiran buaya di pemukiman warga akan mengganggu warga yang tinggal di lokasi tersebut. Bahkan seringkali terjadi penerkaman buaya kepada warga.

"Semoga Dinas Pariwisata bisa juga jadikan penangkaran buaya itu sebagai tempat wisata ke depannya. Biar Pak Ambo bisa kasih makan Buaya Riska dan jadi objek wisata pengunjung," ungkapnya.

Dikatakan Wali Kota Bontang bahwa usulan penangkaran buaya juga pernah diajukannya sewaktu dirinya menjadi Anggota DPRD Bontang Komisi III. Namun usulan tersebut selalu tertolak, lantaran ada aturan yang mengatur terkait buaya.

"Kita terbentur aturan. Buaya ini

ranahnya BKSDA Kaltim. Kalau kita yang membuat penangkaran buaya itu justru kita bisa kena sanksi, karena buaya hewan yang dilindungi," ucapnya.

Ia berharap dari OPD terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) bisa mengusulkan ke BKSDA Kaltim karena ada juga aturan terkait penangkaran buaya di sungai.

"Kalau BKSDA yang minta bantuan ke kita baru bisa kita bantu. Namun ranahnya tetap di BKSDA," imbuhnya.

Ditambahkannya, ide yang dahulu pernah ingin dilakukan adalah bukan penangkaran permanen melainkan, penampungan sementara atau tempat singgah bagi buaya.

"Sementara saja. Jadi buayanya masuk di tempat singgah terus dilepas lagi ke alamnya," pungkasnya. (adv/al)



Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal usulkan penangkaran buaya.

YUSVA ALAM



IST

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking.

Pelaku UMKM Pemula Butuh Bantuan Modal

BONTANG – Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking meminta Wali Kota Bontang agar lebih memperhatikan UMKM di Kota Taman, sebutan Kota Bontang. Lantaran meningkatnya perekonomian di Bontang salahsatunya dipengaruhi kondisi UMKM nya.

Hal itu diungkapkan Raking saat Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 di Pendopo, Rujab Wali Kota, Jumat (18/8/2023).

Dikatakannya, saat ini APBD-P Bontang cukup besar mencapai Rp 2,6 Triliun. Karenanya ia meminta agar anggaran besar tersebut bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan perekonomian Bontang. Setidaknya bantuan dapat

diberikan kepada para pelaku UMKM pemula.

Menurutnya, para pelaku UMKM pemula sangat membutuhkan bantuan pemerintah, khususnya dalam hal permodalan. Lantaran, permodalan dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka.

"Tolong betul-betul dimaksimalkan untuk bantuan modal UMKM. Agar ekonomi kerakyatan di Bontang bisa meningkat, paling tidak di semester terakhir di tahun 2023 ini, sehingga Bontang menghasilkan peningkatan ekonomi," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bontang menanggapi masukan tersebut dengan mengatakan bahwa pihaknya tak bosan-bosannya terus mensosial-

isasikan kepada pelaku UMKM, bahwa industri migas di Bontang ini akan habis. Karenanya perlu transformasi agar tidak lagi berharap pada industri migas, namun beralih ke bidang lainnya seperti perdagangan.

"Kami terus sosialisasi ke masyarakat agar jangan lagi berpikir untuk mencari kerja, tapi mulai berpikir bagaimana menyediakan pekerjaan," kata Basri.

Selain itu pihaknya juga sudah menjembatani para pelaku UMKM dengan perusahaan. Agar difasilitasi pelatihan-pelatihan hingga permodalan. Namun begitu menurutnya, upaya tersebut masih belum membuahkan hasil.

"Sudah difasilitasi bantuan modal tapi masih begitu-begitu aja. Belum ada peningkatan UMKM," pungkasnya. (adv/al)



IST

Kondisi toko korban yang nyaris terbakar beberapa waktu lalu.

Paklek Pentol 99 Meninggal Dunia, Pasca Alami Luka Bakar Hebat

BONTANG - Setelah 6 hari dirawat, penjual pentol 99 sekaligus toko kelontongan di depan SMKN 1, berinisial B meninggal dunia.

Dikonfirmasi oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Belimbing, Bambang Sumantri, korban meninggal dunia di rumah sakit di Samarinda pada Senin (21/8/23) pukul 19.00.

"Saya dapat kabar beliau meninggal pas setelah magrib," ujarnya saat dihubungi redaksi Selasa (22/8/23).

Meskipun sudah dirawat, kondisi

si kesehatan korban terus menurun setelah mengalami luka bakar hingga 75 persen. Setelah awalnya dua hari dirawat di Rumah Sakit PKT, kondisi korban yang melemah langsung dirujuk ke Rumah Sakit AW. Sjahranie, Samarinda.

Setelah dinyatakan meninggal, di hari yang sama korban langsung dibawa kembali ke Bontang ke rumah duka yang berada di BTN KCY. Kini korban telah dimakamkan di kuburan muslim di wilayah pisanan.

"Tadi pagi setelah dimandikan langsung dikubur di pisanan, rumah duka di BTN, di depan SMKN 1 itu hanya tempat dia jualan," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, istri korban, Niyatun menjelaskan bahwa suaminya sedang berada di dapur untuk memasak, namun karena ada kebocoran pada tabung gas, api menyambar korban hingga terkena luka bakar yang serius.

Pewarta: Syakurah
Editor: Yusva Alam



RUTAN TANJUNG REDEB MUSNAHKAN BARANG SITAAN WBP



**Pelaku Penggelapan Mobil Rental
Diringkus 1 Orang Masuk DPO**



Rutan Tanjung Redeb bersama Polres Berau dan Kodim 0902/BRU musnahkan sejumlah barang sitaan dari WBP. (Ist)

RUTAN TANJUNG REDEB MUSNAHKAN BARANG SITAAAN WBP

TANJUNG REDEB – Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb musnahkan barang bukti hasil razia dengan cara dibakar di area lapangan Rutan Tanjung Redeb, Selasa (22/8/2023).

Pemusnahan tersebut menggandeng Polres Berau dan Kodim 0902/BRU dengan disaksikan Satuan Operasi Kepatuhan Internal (Satops Patnal). Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Timur.

Kepala Rutan Tanjung Redeb, Puang Dirham menyebut barang yang dimusnahkan yakni ponsel, charger serta headset. Hasil razia selama dua tahun. Terhitung sejak Januari 2021 hingga Agustus 2023.

“Kita musnahkan handphone dan charger serta headset hasil razia selama 2 tahun ini,” katanya, Selasa (22/8/2023).

Lebih lanjut, Puang menjelaskan bahwa hasil razia dari giat pengeledahan yang sering terlaksana secara rutin dan terjadwal baik secara internal maupun bersama pi-

hak eksternal dari Polres Berau dan Kodim 0902/BRU.

“Tentunya ini hasil dari pengeledahan wisma hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terlaksana secara rutin dan terjadwal sesuai dengan prosedur Pemasyarakatan yang berlaku,” terangnya.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan Kanwil Kemenkumham Kaltim, Arimin memberikan apresiasi kepada Rutan Tanjung Redeb atas sinergi yang terjalin dengan Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya di wilayah Kabupaten Berau.

“Terkait sinergi, Rutan Tanjung Redeb dengan aparat terkait berjalan dengan baik,” ungkapnya.

“Dengan dukungan dari rekan-rekan TNI/Polri, Rutan Tanjung Redeb mampu menjaga kondusifitas area. Sinergi yang terlaksana sangat baik,” sambungnya. **(mnz/dez)**



Polres Berau merilis kasus peredaran narkoba jenis sabu di Berau.

POLRES BERAU AMANKAN 56,89 GRAM SABU, 3 TERSANGKA DIBEKUK DAN 1 MASIH BURON

TANJUNG REDEB - Polres Berau lagi-lagi berhasil menangkap pelaku kasus peredaran narkoba jenis sabu tepat pada 17 Agustus 2023 lalu. Kali ini barang bukti sebanyak 56,89 gram berhasil diamankan.

Wakapolres Berau, Kompol Rangga Abhiyasa didampingi oleh Kasatreskoba, Iptu Didin Nurdin dan PS Kasi Humas, Iptu Suradi mengatakan, bahwa satu orang tersangka berinisial BC dan YS berhasil diamankan dengan Barang Bukti (BB) sabu seberat 0,84 Gram.

"Mendapati laporan masyarakat kami langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku dan BB," ungkap Kompol Rangga, Selasa (22/8/23).

Kemudian dilakukan melakukan pengembangan kasus dan pada 18 Agustus di Kecamatan Kelay. Dan berhasil mendapatkan seorang tersangka lagi berinisial TH dengan barang bukti sabu seberat 56,05 Gram. Namun satu ter-

sangka lain masih DPO.

"Total 3 tersangka dengan total barang bukti sebesar 56,89 gram berhasil kami amankan, berikut barang bukti yang lainnya. Dan satu tersangka lagi masih dalam pencarian," tuturnya.

Para tersangka terancam dikenakan Pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun para pelaku yang diamankan rata-rata merupakan pengedar dengan barang bukti berasal dari Kota Samarinda. Diakuinya, pihaknya mesti kerja ekstra dalam memberantas narkoba. Mengingat ada beberapa pintu masuk yang digunakan para pengedar, diantaranya melalui jalur darat, laut hingga udara yang mungkin saja ada.

"Kendala kita karena terlalu banyaknya pintu masuk. Itu yang harus kita antisipasi," tegasnya. (mnz/dez)



Launching Kampung Bebas Narkoba di Kantor Lurah Gunung Panjang, Selasa (22/8/2023).

Kelurahan Gunung Panjang Deklarasi Kampung Bebas Narkoba

TANJUNG REDEB - Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb ditetapkan sebagai Kampung Bebas Narkoba oleh Polres Berau. Sebagai komitmen bersama memerangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Berau.

Bupati Berau, Sri Juniarsih sangat menyambut baik gerakan positif tersebut. Dikatakannya, Kampung Bebas Narkoba merupakan salah satu implementasi dari Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang diharapkan dapat meminimalisir kasus-kasus penyalahgunaan narkoba melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat dan sinergitas berbagai pihak, sehingga terwujud keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan laporan yang dihimpun oleh Satresnarkoba Polres Berau, pada tahun 2022 lalu, berhasil terungkap sebanyak 89 kasus narkoba, di mana 7 kasus di antaranya terjadi di Kelurahan Gunung Panjang. Kemudian, pada rentang Januari-Agustus 2023, berhasil diungkap 48 kasus. Adapun 2 kasus diantaranya terjadi di Kelurahan Gunung Panjang.

Kendati demikian, kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Kelurahan Gunung Panjang

mengalami penurunan sebesar 71 persen, jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data tersebut, Kampung Bebas Narkoba akhirnya dicanangkan di Kelurahan Gunung Panjang, agar ke depan, wilayah ini benar-benar bebas dan bersih dari narkoba.

"Saya sangat mengharapkan peran aktif dari Polres Berau, dalam hal ini Satresnarkoba, untuk terus memantau dan mendampingi masyarakat Kampung Bebas Narkoba ini. Sehingga ke depan, wilayah ini bukan saja bersih dan bebas dari narkoba, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi kampung/kelurahan yang lain," kata Sri, Selasa (22/8/2023).

Sri juga mengimbau kepada perangkat Kelurahan Gunung Panjang dan warga masyarakat, agar mendukung penuh proses pencaangan ini dan bersikap kooperatif. Sebab, semua ini dilakukan semata-mata untuk kebaikan bersama sekaligus mewujudkan sumber daya manusia Berau yang berkualitas cerdas, sejahtera, dan berbudi luhur.

Kapolres Berau AKBP Steyven Jonly Manopo juga menyampaikan, pembentukan Kampung Bebas Narkoba ini merupakan salah satu bukti keseriusan Polres Berau dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba.

"Tentunya, kita sebagai aparat negara menjalankan sesuai dengan visi Polri untuk menciptakan kondisi yang aman dan kondusif. Sebagaimana yang diamanahkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," ungkapnya.

Menurutnya, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, kasus narkoba di Kabupaten Berau bisa dikatakan meningkat setiap tahun. Adapun 2020 sebanyak 92 kasus, 2021 sebanyak 81 kasus, 2022 sebanyak 89 kasus, dan hingga Agustus 2023 terdapat 48 kasus.

Kendati demikian, dirinya menekankan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam melaporkan tindakan yang dianggap mencurigakan ada di sekitar tempat tinggal masing-masing.

"Data dari tahun ke tahun ini mengalami peningkatan penyalahgunaan narkoba di Berau. Tentu saja, hal ini membutuhkan kerjasama dan peran serta untuk memberantas narkoba," katanya.

Pihaknya juga mengimbau kepada para pengedar untuk berhenti mengedarkan barang tersebut. Jika ditemukan akan segera ditindak. Apabila dalam penindakan tersebut terjadi perlawanan yang membahayakan patugas, pihaknya akan melakukan penindakan tegas. **(mnz/dez)**



Polres Berau merilis kasus penipuan dan penggelapan mobil rental yang terjadi di Kabupaten Berau.

Pelaku Penggelapan Mobil Rental Diringkus 1 Orang Masuk DPO

TANJUNG REDEB - Polres Berau membekuk pelaku sindikat penggelapan mobil rental di Kabupaten Berau. Dari 3 tersangka, satu orang masih dalam daftar pencarian orang (DPO). Masing-masing berinisial MY, MS dan S. Mereka berhasil membawa kabur dua kendaraan roda empat.

Kapolres Berau, AKBP Steyven Jonly Manopo membeberkan, pengungkapan sindikat penggelapan mobil rental tersebut diketahui setelah adanya laporan dari salah satu pemilik jasa rental mobil yang mengaku mobil miliknya tak kunjung kembali setelah disewa oleh pelaku yang tidak bisa dihubungi. Dari laporan itulah, polisi langsung bergerak dan menangkap para pelaku.

Kejadian tersebut dilaporkan korban pada 14 Agustus lalu. Tersangka MY melakukan modus menyewa mobil rental milik korban pada 4 Agustus. MY mengelabuai korban dengan memberikan KTP palsu. Pelaku

juga memberikan uang muka sebesar Rp 1,5 juta untuk membuat pemilik mobil percaya melepaskan mobilnya untuk disewa oleh pelaku.

Kemudian langsung dibawa kabur tanpa sepengetahuan pemilik dan dibawa ke Samarinda untuk dipindahtangankan.

"Setelah berhasil mendapatkan satu mobil, tersangka mencari mobil lain untuk digelapkan dengan modus yang sama pada 8 Agustus," jelasnya, Selasa (22/8/2023).

Menurut pengakuan pelaku sendiri, Dia memperoleh keuntungan sebesar Rp 14 Juta, namun baru dibayarkan Rp 3 Juta.

Diceritakannya, tersangka sendiri berhasil dibekuk di Gang Dimas Jalan Singkuang Kecamatan Tanjung Redeb. Satu tersangka lainnya MS berhasil dibekuk Polres Samarinda. Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lain berinisial S.

"Pelaku MS sebagai penerima di Samarinda dan mencari pembeli mobil hasil dari modus rental di Berau untuk di jual di sana," terangnya.

Selain membekuk pelaku, Polres Berau juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa, 2 unit mobil, 1 buah ponsel, 3 KTP palsu, dan 1 STNK.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka terjerat pasal 372 KUHPidana dan 378 KUHPidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama empat tahun.

Sejauh ini, kata Dia, baru dua orang yang melaporkan ke Polres terkait penggelapan mobil rental tersebut. Pihaknya mengimbau kepada semua pemilik rental di Berau agar tetap berhati-hati dan mengkonfirmasi identitas penyewa dengan jelas.

"Modus seperti ini sering terjadi, harap selalu berhati-hati. Jangan sampai ini terulang lagi di Berau," imbaunya. (mnz/dez)



DAMPAK KEMARAU, PETANI BUAH DI BALIKPAPAN TERANCAM GAGAL PANEN



**GADAIKAN MOBIL KREDIT,
PRIA DI BALIKPAPAN MASUK BUI**



Unit Tipidter Satreskrim Polresta Balikpapan menangkap seorang pria berinisial AN (27) atas dugaan aksi penggelapan mobil.

GADAIKAN MOBIL KREDIT, PRIA DI BALIKPAPAN MASUK BUI

BALIKPAPAN - Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Sat Reskrim Polresta Balikpapan menahan seorang pria berinisial AN (27) atas dugaan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor jaminan fidusia.

Kanit Tipidter Satreskrim Polresta Balikpapan, Iptu Wirawan Trisnadi mengatakan, tersangka AN melakukan pengalihan objek jaminan fidusia berupa satu unit mobil tanpa sepengetahuan pihak pembiayaan untuk meraup keuntungan pribadi.

Kasus ini bermula saat tersangka membeli mobil Daihatsu All New Xenia dengan nomor polisi KT 1790 YO dari sistem kredit di sebuah perusahaan pembiayaan di Balikpapan.

"Tersangka awalnya menggunakan mobil tersebut selama kurang lebih 7 bulan. Pada bulan Juli 2023, tersangka kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain yang diakuinya sebagai keluarga senilai Rp 40 juta," ujarnya, Selasa (22/8/2023).

Lebih lanjut Wirawan Trisnadi menjelaskan, berdasarkan pengakuan tersangka uang hasil gadai itu

digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Namun karena merasa keberatan dan mengetahui mobil tersebut digadaikan tersangka, perusahaan pembiayaan tersebut melakukan pelaporan terhadap tersangka.

Seperti diketahui, jaminan fidusia adalah hak jaminan yang diberikan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, untuk menjamin pelunasan hutang-piutang antara debitur dan kreditur.

"Pelapor di sini merasa jika tersangka telah melanggar perjanjian fidusia tersebut. Makanya dilaporkan," tambahnya.

Atas perbuatan tersangka, pihak pembiayaan mengalami kerugian sebesar Rp 332 juta. Tersangka AN pun dijerat dengan Pasal 36 UURI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Mengalihkan Barang Jaminan Fidusia jo Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

"Ancaman hukumannya adalah pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp 50 juta," tutup Wirawan. (bom)



Agus Basuki saat menunjukkan pohon buah yang mulai mengering akibat kurangnya air.

DAMPAK KEMARAU, PETANI BUAH DI BALIKPAPAN TERANCAM GAGAL PANEN

BALIKPAPAN - Musim kemarau dan cuaca panas yang melanda Indonesia, tak terkecuali di Kalimantan Timur dan Balikpapan khususnya kini mulai dirasakan dampaknya.

Ketua Kelompok Tani Karang Joang, Balikpapan Utara, Agus Basuki mengatakan, sejak tidak ada turun hujan di kawasan Balikpapan Utara dalam kurun waktu beberapa minggu ini, kondisi tanaman buah-buahan yang ada di lahannya mulai mengering dan layu.

"Sudah kering daunnya dan buahnya juga enggak berkembang dengan maksimal," ujarnya, Selasa (22/8/2023).

Lebih lanjut Agus menjelaskan, dari luasan 4 hektar lahan yang dimilikinya, saat ini sekitar 2 hektar lahan untuk tanaman baru tumbuh juga mengalami kekeringan.

"Sudah kita siramin, tapi ketersediaan air kita enggak cukup lagi sudah," jelasnya.

Agus mengaku, jauh hari sebelum memasuki musim kemarau dirinya telah menyiapkan sumber-sumber air. Hanya saja karena sudah lama tidak ada hujan maka sumber airnya pun mulai mengering juga.

"Di sini kita siapkan 3 sumber air, tapi karena kita siram seminggu 3 kali dan enggak ada hujan makanya mulai habis juga," tambah Agus Basuki. Di lahannya saat ini terdapat buah pepaya mini, kacang panjang, tomat dan buncis. Namun karena dampak kemarau, seluruh pohonnya telah mengalami kekeringan termasuk tanah yang mengeras.

"Karena kan ini tanamannya butuh air banyak semua," ujarnya lagi. Agus berharap, dalam beberapa hari ke depan hujan bisa turun di Kota Balikpapan khususnya di wilayah Karang Joang Km 12.

"Ya kalau memang masih enggak ada hujan, tanaman yang baru tumbuh bisa mati dan yang berbuah gagal panen," tutupnya. **(bom)**



PEMKAB BUKA AKSES **HARAPAN BARU-MUARA PASIR** **PASCA LEPAS DARI CAGAR ALAM**



**22 PETAHANA KEMBALI NYALEG,
KETUA BK DPRD PASER
INGATKAN TUGAS KELEMBAGAAN**



Ketua BK DPRD Kabupaten Paser, Rahmadi.

22 PETAHANA KEMBALI NYALEG, KETUA BK DPRD PASER INGATKAN TUGAS KELEMBAGAAN

PASER - Dari total 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, setidaknya ada 22 orang di antaranya yang dipastikan kembali maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang untuk Kabupaten Paser.

Sementara 8 orang lainnya, dipastikan maju di tingkat provinsi atau memilih untuk tidak maju kembali. Hal itu diketahui, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser merilis Daftar Calon Sementara (DCS) yang diumumkan sejak Sabtu (19/8/2023) lalu.

Dalam proses tahapan, Ketua KPU Kabupaten Paser, Abdul Qayyim Rasyid menyatakan, masyarakat dipersilakan untuk memberikan tanggapan terhadap DCS yang sudah dilampirkan KPU Kabupaten Paser.

"Masukan dan tanggapan

masyarakat disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan bukti yang relevan," kata Qayyim.

Qayyim mengatakan, tanggapan masyarakat terhadap DCS, penting sebagai masukan bagi KPU Kabupaten Paser sebelum anggota partai politik (parpol) tersebut ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT).

Pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat, jika terdapat bukti yang bisa menggugurkan para bakal calon legislatif (Bacaleg) tersebut sebelum ditetapkan sebagai Caleg pada November 2024 mendatang.

"Setelah diumumkan DCS ini, kami akan umumkan daftar calon tetap pada 3 November mendatang," ujar Qayyim.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Paser, Rahmadi, meng-

ingatkan agar setiap anggota DPRD Kabupaten Paser agar terus menjalankan tugas kelembagaan hingga masa periode berakhir.

Ia menyebut, di tengah kesibukan tahun politik, anggota DPRD Kabupaten Paser tidak mengesampingkan tugasnya. Sebagai pihak yang memilih untuk tidak kembali nyaleg, Rahmadi berharap masukan tersebut dapat dilaksanakan.

"Yang pasti tidak mengabaikan tugasnya lah. Toh kita masih menjabat sampai Agustus 2024 nanti," ucap politisi Golkar itu.

Untuk diketahui, hingga kini DCS yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Paser sebanyak 367 orang. Ratusan para Caleg itu diusung oleh 17 Partai Politik (Parpol) yang ada di Kabupaten Paser. **(bs)**



Peninjauan pembukaan jalan

PEMKAB BUKA AKSES HARAPAN BARU-MUARA PASIR PASCA LEPAS DARI CAGAR ALAM

PASER - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser dalam meningkatkan infrastruktur yang selama ini terhambat akibat status kawasan cagar alam perlahan mulai dibenahi. Terkini, beberapa ruas jalan yang masuk cagar alam, sudah dilakukan perbaikan.

Seperti ruas jalan dari Desa Harapan Baru, Kecamatan Kuaro menuju Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot yang kini tengah dibuka setelah Pemkab Paser mendapat persetujuan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Bupati Paser, Fahmi Fadli menjelaskan, selama ini tidak ada akses jalan penghubung antar desa sehingga masyarakat setempat terkesan terisolir dan menggunakan alternatif lain untuk dapat mengakses wilayah.

Sehingga pihaknya mengupayakan agar dibukakan akses jalan bagi masyarakat. Adapun pola yang dilakukan, dengan mengajukan usulan ke Kement-

erian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI melalui BKSDA Provinsi Kaltim.

"Kami menemukan pola, untuk membuka akses jalan Air Mati (Desa Harapan Baru) ke Muara Pasir melalui kerja sama yang akan kami jalankan. Tentunya dengan berbagai persyaratan, terkhusus yang akan dikerjakan di kawasan ini," kata Fahmi.

Adapun akses jalan yang dibuka sepanjang 10 kilometer. Kendati sudah mendapat persetujuan, Fahmi menyebut, bukan berarti dapat semerta-merta diusulkan pembangunan permukiman di kawasan yang berada dalam status cagar alam.

Namun, lanjut Fahmi, untuk jangka panjang dikatakannya akan dilakukan upaya pembebasan kawasan tersebut. Pihaknya berharap, upaya yang dilakukan Pemkab Paser dapat berdampak bagi kebutuhan masyarakat

"Kami berharap masyarakat juga turut serta menjaga, turut

melestarikan kawasan CA. Jika sudah kami akan koordinasikan dengan pihak BKSDA," ujarnya.

Fahmi menambahkan, pada 2023 ini pembangunan jalan dilakukan sepanjang 6 kilometer dahulu. Sementara sisanya, bakal dirampungkan pada 2024 mendatang. Sehingga penyelesaian peningkatan jalan di wilayah tersebut langsung cepat dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Kepala BKSDA Provinsi Kaltim, Ari Wibawanto yang juga ikut meninjau pengerjaan dengan dibukanya akses ruas jalan baru itu, dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Paser, Hasanuddin Meradje mengatakan, pengerjaan pembukaan jalan dengan panjang 6 km menelan Rp 23,4 miliar.

"Kita bakal lanjut lagi pada anggaran 2024 masih ada sekitar 4 sampai 5 kilometer lagi," kata Hasanuddin. **(bs)**